UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang Berat**
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta.

Armiwulan, Hesti, 2017, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, Ruas Media, Yogyakarta.

Arosemena, Gustavo, "Human Rights", dalam Jaap Hage, Antonia Waltermann, Bram Akkermans, 2024, *Introduction to Law (Second Edition)*, Springer, Switzerland.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary Revised 4th Edition*, West Publishing Co., Minnesota.

Christianty, Diajeng Wulan, Ifdhal Kasim, dan Trihoni Nalesti Dewi, 2007, *Pengadilan Pura-Pura: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

Hadiz, Liza, Saparinah Sadli, Kamala Chandrakirana, Andy Yentriyani, dan Diana Lusi C., 2003, *Seri Dokumen Kunci 4: Kumpulan Ringkasan Eksekutif Laporan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok, dan Papua 1999—2001*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.

Hanafi, Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.

Krennerich, Michael, 2024, *Human Rights Politics: An Introduction*, Springer, Switzerland.

Mahkamah Agung, 2006, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, Mahkamah Agung, Jakarta.

Meloni, Chantal, 2010, *Command Responsibility in International Criminal Law*, T.M.C. Asser Press, The Hague.

Mettraux, Guénaël, 2009, *The Law of Command Responsibility*, Oxford University Press, Oxford.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sari, Intan Kumala, dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2009, *Kronik Singkat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Lahirnya, Implementasi, dan Rencana Amandemen*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

Sari, Intan Kumala, dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2009, *Mengapa Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Harus Direvisi?*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

Schabas, William A., 2016, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford.

Soekanto, Soerjono, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Triffterer, Otto, "Article 28", dalam Otto Triffterer dan Kai Ambos, 2016, *Rome Statute of the Internasional Criminal Court: A Commentary (Third Edition)*, Hart Publishing, Portland.

United Nations Security Council, 2000, *Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra Leone*, United Nations, New York.

Van Sliedregt, Elies, 2003, *The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law*, T.M.C Asser Press, The Hague.

Van Sliedregt, Elies, 2012, *Individual Criminal Responsibility in Internasional Law*, Oxford University Press, Oxford.

B. Skripsi, tesis, disertasi

Krisnan, Johny, 2008, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Kusworo, Haryo, 2006, *Penerapan Tanggung Jawab Komandan terhadap Kejahatan Prajurit dalam Kerusuhan di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putra, Muhammad Farzha, 2025, *Analisis Yuridis Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Paniai (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks)*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Setiyono, Joko, 2010, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

terhadap Kemanusiaan di Indonesia), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Siswadi, Imran, 2012, *Pelanggaran HAM Berat Pasca Jajak Pendapat di Timor-Timur Tahun 1999 dan Pertanggungjawaban Komando*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wongkar, Vonny A., 2006, *Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Artikel jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Anwar, Adelwin Airel, dan Harish Makarim, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komando di Indonesia sebagai Perwujudan Keadilan Transisi", Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2, Maret 2021.

Ariadno, Melda Kamil, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No. 3, April 2008.

Guzman, Andrew T., dan Timothy L. Meyer, "International Soft Law", *Journal of Legal Analysis*, Vol. 2, No. 1, Maret 2010.

Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, dan Hardianto Djanggih, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, November 2021.

Hanafi, "The Dynamic Aspects of Criminal Act and Criminal Liability in Money Laundering Practices", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4, Oktober 2010.

Laia, Sri Wahyuni, dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, Januari 2022.

Lemkin, Raphael, "Genocide", *The American Scholar*, Vol. 15, No. 2, 1946.

Nusantara, Abdul Hakim G., "Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 2, No. 2, November 2004.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sihombing, P.L.T., "Pertanggung Jawaban Komando", *Jurnal HAM*, Vol. 2, No. 2, November 2004.

Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq, dan Vania Lutfi Safira Erlangga, "Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional di dalam Konstitusi Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 36, No.1, 2024

D. Internet

Afsaloka, Tetri Mutiara, "PERMA atau SEMA? Jangan Sampai Keliru Memahaminya", *https://www.pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/1402-perma-atau-sema-jangan-sampai-keliru-memahaminya-i-06-08-2026*, diakses 11 September 2026.

Auli, Renata Christa, "8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya", *https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/*, diakses pada 5 Mei 2026.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf*, diakses 29 Juni 2026.

Dictionary, "About To", *https://www.dictionary.com/browse/about-to*, diakses 3 Agustus 2026.

Global Institute for the Prevention of Aggression, "International Military Tribunal for the Far East, Judgment of 4 November 1948", *https://crimeofaggression.info/documents/6/1948_Tokyo_Judgment.pdf*, diakses 10 Juni 2026.

Global Institute for the Prevention of Aggression, "International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment of 1 October 1946", *https://crimeofaggression.info/documents//6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf*, diakses 10 Juni 2026.

International Criminal Tribunal for Rwanda, "ICTR Trial Judgements", *https://unictr.irmct.org/en/cases/trial-judgements*, diakses 10 Juni 2026.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "Judgement List", *https://www.icty.org/en/cases/judgement-list*, diakses 10 Juni 2026.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pernyataan Pers Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat",

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.setneg.go.id/baca/index/pernyataan_pers_presiden_ri_tentang_pelanggaran_ham_berat, diakses 17 Mei 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", *https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf*, diakses 17 Mei 2026.

Manan, Munafrizal, "Dua Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *www.hukumonline.com/berita/a/dua-jenis-pelanggaran-hak-asasi-manusia-lt60af046bbe964*, diakses 5 Mei 2026.

Munawaroh, Nafiatul, "Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA", *https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/*, diakses 8 Agustus 2026.

Nugraheni, Arita, "Empat Pelanggaran HAM Berat, Hanya Satu Bersalah," *https://www.kompas.id/artikel/empat-pelanggaran-ham-berat-hanya-satu-bersalah*, diakses 12 April 2026.

Saputro, Aditya Wahyu, "Bagaimana Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang Undang?", *https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-kekuatan-hukum-penjelasan-atas-undang-undang-cl3276/*, diakses 8 Agustus 2026.

Sari, Haryanti Puspa, "Komnas HAM Tetapkan Peristiwa Paniai Masuk Pelanggaran HAM Berat", *https://nasional.kompas.com/read/2020/02/15/12412111/komnas-ham-tetapkan-peristiwa-paniai-masuk-pelanggaran-ham-berat*, diakses 10 Juni 2026.

Sidharta, "Visi-Misi Negara dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD", *business-law.binus.ac.id/2018/08/05/visi-misi-negara-dan-pokok-pikiran-pembukaan/*, diakses 2 Juli 2026.

The National WWII Museum, "The Nuremberg Trials", *https://www.nationalww2museum.org/war/topics/nuremberg-trials*, diakses 1 Mei 2026.

The National WWII Museum, "Tokyo War Crimes Trials", *https://www.nationalww2museum.org/war/topics/tokyo-war-crimes-trial*, diakses 1 Mei 2026.

E. Instrumen Hukum Internasional

Charter of the International Military Tribunal For Far East Tokyo.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Charter of the International Military Tribunal.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Universal Declaration of Human Rights.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

Vienna Declaration and Programme of Action.

Rome Statute of the International Criminal Court.

Security Council resolution 1264 (1999) on establishment of a multinational peace force in East Timor.

Security Council resolution 1315 (2000) on establishment of a Special Court for Sierra Leone.

Security Council resolution 1503 (2003) on implementation of Completion Stategies of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda.

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

Statute of the International Tribunal for Rwanda.

Statute of the Special Court for Sierra Leone.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang Berat**
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824).

G. Putusan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks.